



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
: KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARIS WIDAGDO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 867913

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 626.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m²/94 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m²/45 m² di KAB / KOTA KARAWANG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 342.000.000

1. MOTOR, N-MAX 20P-RA/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 34.000.000
2. MOTOR, CBR H5CO2R2OM1M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
3. MOTOR, PCX FLC02032LOAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000
4. MOBIL, INOVA KIJANG INOVA 2.0 GM/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 10.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ---

Sub Total Rp. 978.000.000

III. HUTANG Rp. ---



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

978.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIT KERJA :
KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMPHI ROSAGTINA BERNIKE SINAGA
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 495205

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/200 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	240.000.000
1. MOBIL, STARGEZER MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	82.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.347.166
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.328.747.166
III. HUTANG	Rp.	1.957.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	371.747.166

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.